

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Perjalanan panjang gerakan perempuan dalam membawa agenda untuk menuntut representasi perempuan dalam politik membuahkan hasil dalam bentuk ketentuan angka 30% keterwakilan politik perempuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik. Gerakan perempuan menjadi komponen penting dalam peningkatan angka keterwakilan politik perempuan, sebagai upayanya gerakan perempuan membawa isu keterwakilan politik perempuan dalam agenda perjuangan. Di sisi lain, sudah dua puluh tahun sejak diberlakukan kebijakan afirmatif namun keterwakilan perempuan dalam parlemen belum mampu menyentuh angka 30%.

Masalah berlapis dalam pemenuhan angka keterwakilan politik perempuan ditemukan, salah satunya adalah agenda dari gerakan perempuan itu sendiri. Agenda-agenda gerakan perempuan yang masih berjarak dengan isu pemilu menjadi salah satu faktor dari sulitnya perempuan untuk memenuhi angka keterwakilan perempuan dalam politik. Akibatnya, agenda yang dibawa oleh gerakan perempuan tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal lainnya difaktori oleh wajah maskulin partai politik yang cenderung didominasi oleh laki-laki sehingga hal ini pun menjadi masalah dalam pemenuhan keterwakilan perempuan dalam politik.

Dilihat dari salah satu tipologi gerakan, yaitu *alternative movements*, *reformativemovements*, *redemptive movements*, dan *transformative movements*. Dari tipologi gerakan tersebut, gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik masuk ke dalam klasifikasi gerakan reformatif. Gerakan reformatif menjelaskan bahwa faktor eksternal dari suatu gerakan sosial dapat menjadi hambatan bagi gerakan sosial untuk mencapai tujuannya, seperti halnya yang terjadi dengan gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini disebabkan oleh gerakan perempuan yang eksis dalam negara yang sistem pemerintahannya dikuasai oleh segelintir orang. Dominasi oligarki yang ada pada suatu negara atas

sistem pemerintahan menjadi faktor dari tujuan atau agenda dari gerakan perempuan yang tidak tercapai. Faktor-faktor seperti wajah maskulin pemerintahan, budaya patriarki dalam masyarakat maupun politik patriarki, politik uang yang selalu ada setiap pemilu, adalah beberapa faktor yang mempengaruhi agenda gerakan perempuan.

Kendala yang dihadapi oleh gerakan perempuan tidak hanya datang dari dalam gerakan saja, melainkan juga dari internal partai politik. Perlu digaris bawahi bahwa partai politik adalah media utama dalam peningkatan angka keterwakilan politik perempuan namun hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik melihat ketentuan angka 30% keterwakilan perempuan sebagai “formalitas” angka yang hanya harus dipenuhi secara administratif. Penyempitan ruang partisipasi perempuan masih terlihat dalam partai politik. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa masalah ini datang dalam bentuk tidak didengar pendapat calon legislatif perempuan oleh partai yang mengusung, yang pada akhirnya memilih untuk mundur dari pencalonan. Hal ini tentu berdampak pada angka keterwakilan perempuan dalam politik. Kemudian diperparah oleh adanya diskriminasi terhadap calon legislatif perempuan dengan latar belakang pekerjaan yang dianggap tidak mumpuni untuk mau sebagai anggota legislatif oleh masyarakat. Lebih jauh, representasi perempuan dalam politik saat ini masih terbatas pada perempuan yang memiliki akses lebih yang tidak sedikit datang dari kalangan menengah keatas. Akibatnya walaupun ada representasi perempuan di dalam parlemen, hal itu tidak menyediakan kebijakan yang pro-perempuan.

Pada akhirnya agenda keterwakilan politik perempuan yang dibawa oleh gerakan perempuan akan selalu menemui kendala jika dari media utama peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik saja mengemban nilai serta sikap yang meminggirkan perempuan, ditambah dengan adanya kampanye yang dilakukan oleh partai politik mengandung nilai seksisme yang dilakukan demi memperoleh suara bagi calon legislatif perempuan.

V.2. Saran

V.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan saran praktis sebagai berikut:

1. Gerakan perempuan sudah harus menyertakan agenda gerakan dengan menyentuh isu pemilu. Gerakan perempuan sudah harus menjadikan isu ini menjadi isu utama dalam gerakan karena representasi perempuan dalam politik akan melahirkan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan perempuan dengan syarat perempuan yang akan maju dalam kontestasi politik harus perempuan yang memiliki perspektif feminisme dan kesadaran kelas.
2. Atas hal diatas, masalah peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik adalah masalah yang berlapis yang tidak hanya datang dari satu hal saja dalam hal ini, partai politik sebagai media utama pemenuhan angka keterwakilan perempuan dalam politik juga harus bekerjasama dengan gerakan perempuan dalam mencalonkan calon legislatif perempuan untuk maju dalam kontestasi politik. Lebih dari itu pemerintah harus tegas dalam pemenuhan angka keterwakilan perempuan dalam politik sehingga hal ini tidak hanya dilihat sebagai isu yang harus dipenuhi secara kuantitas namun dalam segi kualitas pula.
3. Diharapkan kedepannya untuk organisasi perempuan dapat membangun kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik serta mendukung agenda yang dilakukan gerakan perempuan dalam upaya peningkatan angka keterwakilan politik perempuan.

V.2.2 Saran Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk dikembangkan bagi penelitian selanjutnya mengenai Gerakan Reformatif Perempuan dalam Peningkatan Angka Keterwakilan Perempuan dalam Politik
2. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan pembahasan gerakan perempuan dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan yang belum dibahas di dalam penelitian ini.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi gerakan perempuan, partai politik, serta pemerintah dalam upaya peningkatan angka keterwakilan politik perempuan dengan mengatasi masalah yang berlapis dari keterwakilan perempuan dalam politik